

KOMUNIKASI POLITIK: ASAL USUL DAN KONSEPSI

Eny Inti Suryani

Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Lampung

Email: enyintisuryani@gmail.com

Abstract

Political communication is political analysis method emerged in 1990s for political science in Indonesia. Yet, it was began to pervade and apply significantly by academicians in the beginning of 21st century, pertaining to democratization and its anti-thesis, that is, terrorism in global context as well as regional and national one. As a method in political science, study of conception of political communication is very substantial for clarification on applying it more enlightened. The significance could be grasped through scrutiny of historical background. In fact, the scientific conception has not been concluded by scholars so far, but various opinions, let alone theories, based on skepticism and debates constructed by political phenomenon and development. History and development of political communication study actually are prosperous subject materials to discover the firm conception.

Keywords: *Political communication, history, method, conception*

Abstrak

Komunikasi politik (*political communication*) adalah metode analisa politik yang baru berkembang sejak dasawarsa 1990an dalam ilmu politik di Indonesia, namun ia mulai diserap dan diterapkan secara signifikan di dunia akademik sejak awal abad ke-21, ketika perkembangan demokrasi dan antitesisnya, yaitu terorisme, mencuat secara global. Sebagai metode analisa dalam ilmu politik, penelitian tentang konsepsi komunikasi politik sangat penting untuk mengamati dan memahami fenomena politik. Signifikansi ini hanya bisa dipahami jika penelitian mengungkap sejarahnya. Karena itu, asal usul dan sejarah perkembangan kajian komunikasi politik sangat penting untuk diteliti. Konsepsi komunikasi politik belum dicapai secara ilmiah oleh para sarjana, kecuali keberagaman opini atas dasar keraguan dan perdebatan yang hanya berdasar pada fenomena dan perkembangan politik. Sejarah dan perkembangan studi sesungguhnya merupakan bahan yang kaya untuk mencapai konsepsi yang handal tentang komunikasi politik.

Kata kunci: Komunikasi politik, sejarah, metode, konsepsi

PENDAHULUAN

Komunikasi politik (*political communication*) adalah metode analisa politik yang baru berkembang sejak dasawarsa 1990an dalam ilmu politik (Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun, 1993) di Indonesia, namun ia mulai diserap dan diterapkan secara signifikan di dunia akademik sejak awal abad ke-21, ketika perkembangan demokrasi dan teknologi informasi melanda secara global. Meskipun demikian, arus

demokratisasi ini juga melahirkan terorisme di seluruh pelosok dunia.

Sebagai metode analisa dalam ilmu politik, penelitian tentang konsepsi komunikasi politik sangat penting untuk klarifikasi tentang metode mengamati dan memahami fenomena politik. Bilamana konsepsi ini sudah dikembangkan sejak dasawarsa 1920an dengan konsep opini publik (*public opinion*) dalam kesarjanaan Barat, abad ke-21 adalah masa dari kajian

komunikasi politik yang berkembang biak dengan cepat dan menarik perhatian banyak sarjana, penulis dan pengamat. Penyebabnya adalah dialektika politik yang semakin meruncing serta perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang membuka ruang komunikasi secara revolusioner ketimbang generasi alat komunikasi sebelumnya. Karena itu, asal usul dan perkembangan kajian komunikasi politik sangat penting untuk diteliti.

Kajian ini bertujuan klarifikasi tentang metode komunikasi politik ini sebagai piranti penelitian ilmu politik sejak asal usul, perspektif teoritis sampai perkembangan mutakhirnya. Namun, kajian ini tidak hanya merupakan ensiklopedia, tetapi mengulas berbagai perspektif dan perdebatannya secara teoritis. Dengan demikian, persepektif sejarah ide dipadukan dengan kritik, untuk mencapai kesimpulan yang mengangkat secara substansial alat analisa komunikasi politik atas momentum dan fenomena politik pada umumnya.

RUMUSAN MASALAH

Klarifikasi teori komunikasi politik mencakup pertanyaan sebagai berikut:

1. Kapan komunikasi politik mulai diangkat sebagai teori penelitian fenomena politik?
2. Sejauh mana perdebatan para sarjana politik tentang teori komunikasi politik?

METODE PEMBAHASAN

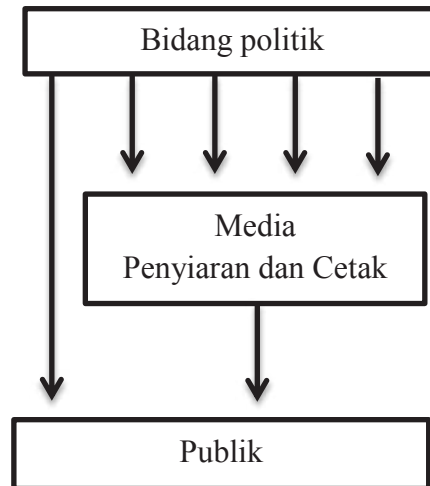
Atas dasar rumusan masalah, metode pembahasan bersandar pada penelitian pustaka tentang teori komunikasi politik. Objek material pembahasan adalah konsepsi komunikasi politik secara historis dan berbagai perspektifnya dari kajian sarjana politik. Kritik terhadap berbagai perspektif

diarahkan pada perbedaan antar perspektif, meskipun para sarjana politik tidak secara langsung melancarkan perdebatan satu sama lain. Dengan kajian sejarah dan kritiknya, klarifikasi tentang teori komunikasi politik akan bisa dicapai sebagai alat analisis fenomena politik yang sangat diminati oleh para sarjana pada masa kini.

Dengan demikian, metode pembahasan adalah analisa sejarah kritis untuk klarifikasi konsepsi komunikasi politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

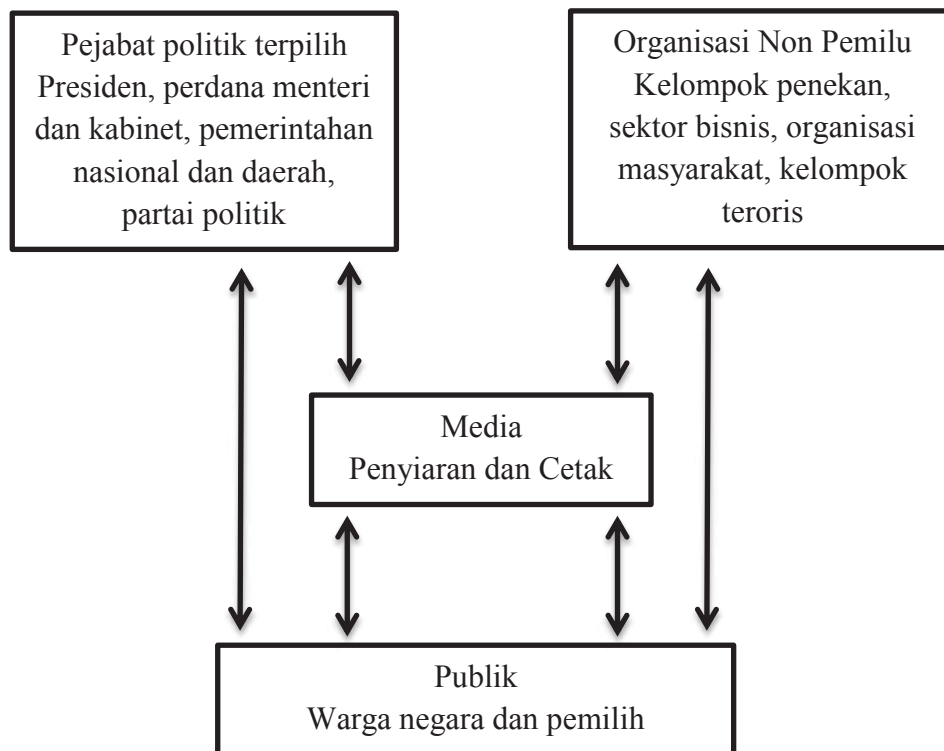
Komunikasi politik sebagai tindakan secara historis hanya bisa ditemukan ketika komunitas politik sudah terbentuk. Keberadaan komunitas politik dalam sejarah biasanya dilacak oleh para sarjana Barat sampai pada masa Yunani kuno, ketika polis berdiri di kawasan ini. Kaid (2004: 69) mencatat bahwa karya-karya Plato pada masa Yunani kuno menunjukkan jejak komunikasi politik. Karena itu, menurut Lilleker (2006: 5), komunikasi politik setua kegiatan politik. Ia adalah suatu unsur khusus dari politik Yunani kuno dan imperium Romawi, seperti halnya unsur dari berbagai sistem politik di era modern. Para pemimpin politik di bawah sistem politik apapun, sangat mungkin dituntut untuk berkomunikasi dengan kelompok lain dalam masyarakat atau harus meyakinkan rakyat untuk mendukung mereka, sering kali untuk menentang seteru politik dan posisi mereka. Namun, dalam sejarah masyarakat yang lebih umum, komunikasi politik bersifat linier, yaitu proses dari para pemimpin kepara rakyat. Gambar 1 menunjukkan arus komunikasi dari atas ke bawah sebagai mayoritas yang ditangkap oleh media dalam menyalurkan komunikasi, atau kini dikenal dengan proses mediasi. Sementara arah komunikasi lapisan bawah masyarakat kepada bidang politik, tidak begitu berarti.



Gambar 1 Pandangan tradisional tentang arus komunikasi politik Lilleker (idem)

Pada intinya, semua masyarakat yang sudah mengalami evolusi sebagai suatu kota yang memerlukan tatanan kekuasaan, apakah ia berbentuk monarki atau republik, sangat mungkin menerapkan komunikasi politiknya. Karena itu, secara historis, polis Yunani hanyalah salah satu *locus* keberadaan masyarakat politik dan unsur komunikasi politiknya. Penemuan prasasti Hammurabi yang mencatat hukum di Timur Dekat (Potts, 2012: 36) atau pun hieroglif Mesir kuno juga merupakan komunikasi politik dari kekuasaan sosial politik di masyarakat kuno. Catatan hieroglif dalam prasasti yang berasal dari masyarakat milenium kedua dan pertama sebelum Masehi, merepresentasikan bahasa yang digunakan para penguasa untuk monumen mereka (idem: 727). Hasil penelitian arkeologis ini

membuktikan bahwa teori Lilleker hanya bisa dirujuk sebagai konsepsi komunikasi politik dalam ruang dan waktu yang beragam, yaitu komunikasi politik setara kegiatan politik. Selain itu, pandangan historisnya tidak mengungkap masyarakat politik melalui kajian filologis dan bukti arkeologis untuk mengetahui asal usul dan ciri-ciri keberadaan masyarakat politik. Masyarakat kesukuan yang masih eksis di Afrika atau di kawasan Asia, misalnya di China, Malaysia dan Indonesia, belum termasuk masyarakat politik, karena tidak ada kekuasaan politik elitis atas para anggota komunitas suku. Apa ciri-ciri masyarakat politik yang memuat unsur komunikasi politik secara historis belum diungkap dengan jelas dalam kajian Lilleker.



Gambar 2 Tataran komunikasi Politik
Lilleker (2006: 6)

Gambar 2 menunjukkan garis komunikasi yang secara teoritis terbuka antar kelompok. Bagaimana komunikasi dijalankan sangat beragam, dan bagaimana pesannya disampaikan tergantung pada kuantitas dan tingkat dukungan kepada sebuah partai, kelompok atau tujuan dan taktik yang digunakan untuk menyebarkan pesan komunikasi politik. Namun, dalam masyarakat majemuk, secara teoritis, semua kelompok saling berkomunikasi satu sama lain dan belajar dari serta bersaing antar mereka.

Praktek aktual dari komunikasi politik sebagai disiplin ilmu muda, bisa dilacak juga dari masyarakat Abad Pertengahan Inggris. Paus Suci III memerintahkan para bawahannya di Inggris pada tahun 1213 untuk memasang sebuah poster yang berbentuk segel Paus di pintu-pintu gereja untuk mengucilkan Raja Inggris pada saat itu,

John. Gereja Katholik menggunakan cara terbaik untuk menyebarkan pesan kepada jemaat gereja yang setia sebagai mayoritas untuk bersaing dalam mendapatkan dukungan rakyat. Pesan ini memuat sikap bahwa raja dan kerajaan Inggris tidak diakui lagi oleh Gereja: "Pertahankan Raja dan Hapuskan campur tangan." Komunikasi tersebut tampil saat ini, antara negara dan di dalam negara, tujuan utamanya adalah persuasi: penerima pesan seharusnya bertindak sesuai dengan cara yang diinginkan pengirim pesan. (Lilleker, 2006: 1)

Kajian sejarah perkembangan tindakan dan konsepsi komunikasi politik ini diterapkan oleh mayoritas sarjana. Mereka juga mencapai kesimpulan yang sama bahwa komunikasi politik adalah bidang studi multi-disipliner. Kaid menggarisbawahi bahwa sebagai bidang studi lintas

disipliner (cross-disciplinary), komunikasi politik mulai mencuat pada dasawarsa 1950an (Nimmo & Sanders, 1981 dalam Kaid, 2004: 69). Selama dasawarsa ini, label komunikasi politik (*political communication*) mulai dipakai untuk menjabarkan proses campur tangan dari lembaga politik dan warga negara yang saling berinteraksi serta “pengaruh politik dikerahkan dan disebarkan” (Nimmo & Sanders, 1981: 12). Namun, menurut McNair (1995: xiv) dan Perloff (2014: xx), Walter Lippmann sudah mengangkat kajian opini publik (*public opinion*) pada tahun 1922 sebagai bidang komunikasi politik.

Hanya saja Kaid (2004: 70-71) mencatat bahwa upaya sintesis yang melahirkan bidang kajian komunikasi baru, sudah dicapai sehingga dia menelusuri tradisi kajiannya dalam lima kelompok. *Pertama*, tradisi analisis retorika dari wacana politik publik. Tradisi ini mungkin studi paling lama dalam sejarah. Beberapa penulis klasik dalam tradisi ini adalah Aristoteles, Blair, Campbell dan Whately. Pendekatan ini pada umumnya bersifat kualitatif dan secara historis-kritis meneliti sumber pesan politik (seperti motif dan langgam penutur) dan pesan itu sendiri.

Kedua, tradisi kajian propaganda politik selama periode pasca Perang Dunia I sampai pasca Perang Dunia II. Para sarjana seperti Lasswell dan Doob memusatkan perhatian pada berbagai cara pemerintahan dalam menggunakan pesan propaganda/persuasif untuk mempengaruhi opini publik. Analisis kuantitatif Lasswell (1927) tentang pesan yang disampaikan pemerintahan membuktikan kekuatan dari komunikasi politik massa dalam membentuk opini publik. Pertanyaan Lasswell, “Siapa yang menyatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan dampak apa?” menjabarkan dengan jelas proses

komunikasi dan mendefinisikan suatu bingkai penelitian untuk kajian komunikasi selanjutnya.

Ketiga, tradisi kajian voting di Amerika Serikat yang dimulai pada dasawarsa 1940an-1950an. Dalam garis penelitian ini, para sarjana memadukan ragam metode penelitian kuantitatif dan kualitatif (misalnya survei wawancara langsung dan pengamatan terlibat, analisa isi biografi dan kajian panel dengan wawancara terfokus).

Keempat, tradisi penelitian pengaruh media massa. Tradisi ini dirintis Lazarsfeld dalam menantang model dominan dari komunikasi massa. Dia mengembangkan beberapa konsep seperti opini kepemimpinan dan arus komunikasi dua langkah. Para sarjana (misalnya Klapper, 1960) kemudian mengajukan model pengaruh minimal dari komunikasi massa. Mereka berpendapat bahwa komunikasi massa mempunyai pengaruh terbatas pada perilaku politik rakyat dan “pemilihan paparan (*exposure*), persepsi dan ingatan dari komunikasi massa dibuat untuk memperkuat kembali atau hanyalah mencapai perubahan kecil dari kecenderungan politik (Nimmo, 1977: 442). Perubahan sikap sebagai fokus dalam tradisi penelitian ini terutama diteliti melalui eksperimen seperti serangkaian kerja penelitian Yale yang ditunaikan oleh Hovland dan rekan-rekannya (Nimmo & Sanders, 1981).

Kelima, tradisi kajian lembaga press dan pemerintahan dalam hubungannya dengan opini publik. Dalam tradisi ini, Lippmann dalam karyanya yang berjudul *Public Opinion*, 1922, pertama kali meneliti fungsi penyusunan agenda (*agenda-setting*) dari media massa. Menurut tradisi ini, pengaruh politik media massa adalah hasil dari proses penyusunan agenda, ketika media massa tidak mencapai banyak keberhasilan dalam

menyampaikan apa yang harus dipikirkan rakyat, namun berhasil dengan menarik perhatian dalam menyampaikan apa yang dipikirkan rakyat” (Cohen, 1963: 13).

Klasifikasi Kaid ini memuat berbagai spektrum studi komunikasi politik sebagai peta yang komprehensif untuk mengetahui fokus, ruang lingkup dan tujuan studi komunikasi politik. Seperti susunan kalimat aktif yang lengkap, komunikasi politik memuat subjek, predikat dan objek. Hubungan subjek dan objek dalam komunikasi adalah fundamental dengan sarana (predikat) dalam membentuk kesadaran objek tentang kekuasaan. Dalam konteks kekuasaan inilah, komunikasi yang terjalin secara sintetis atau pun kontradiktif, bersifat politik.

Lilleker (2006: 1) mengungkap bahwa naskah modern tentang komunikasi politik mencakup tiga aktor atau subjek, yang sebagian bertindak di luar batas negara dalam memproduksi komunikasi politik. *Pertama*, bidang politik itu sendiri: negara dan aktor politiknya. Peran mereka adalah menyampaikan (*communicate*) tindakan mereka kepada masyarakat untuk mendapatkan legitimasi dan persetujuan rakyat. *Kedua*, aktor non negara yang mencakup organisasi dengan motivasi politiknya, badan usaha dan para pemilih (*voters*). Setiap organisasi dan kelompok ini menyampaikan pesan dalam ruang politik dengan harapan mencapai pengaruh tertentu. *Ketiga*, media penyalur atau gerai media (*media outlets*) untuk menyampaikan perihal politik dalam mempengaruhi publik dan masyarakat politik. Pada dasarnya, setiap organisasi dan kelompok menyatakan sesuatu menurut keinginan dan kebutuhan mereka dalam waktu tertentu, namun saling mempengaruhi dan mungkin dipimpin oleh satu kelompok

husus dalam merumuskan argumen, opini, kebijakan, persepsi atau sikap.

Lilleker (2006: 9) menyimpulkan secara historis bahwa komunikasi politik sudah mengalami perubahan dari kegiatan langsung, personal dan tatap muka, menjadi tindakan tidak langsung melalui media komunikasi massa yang berkembang pesat sejak abad ke-20. Bias dan disinformasi tentu saja juga mengisi komunikasi politik. Namun skema kajian Lilleker dan Kaid masih mencakup media massa televisi dan cetak, belum memasukkan arti penting media sosial secara komprehensif pada era teknologi informasi sejak awal abad ke-21. Newman (2010), McNair (edisi kelima, 2011) dan Perloff (2014) adalah para peneliti komunikasi politik yang mencapai perkembangan secara mengejutkan pada era teknologi informasi. Perkembangan baru dari media sosial sejak teknologi informasi mengubah segala saluran komunikasi tradisional, menarik para sarjana dan akademisi untuk meneliti pengaruhnya. Sarana baru dari teknologi informasi ini menjadi fokus perhatian yang semakin besar dari penelitian komunikasi politik sejak dasawarsa kedua abad ke-21.

MASALAH DEFINISI DAN ANASIR KOMUNIKASI POLITIK

Setelah penelusuran dan kritik terhadap sejarah dan ruang lingkup komunikasi politik, sebagian sarjana menghadapi masalah definisi. McNair (2011: 3-4) meneliti masalah komunikasi politik yang sulit didefinisikan dengan tepat, karena unsur frase sendiri (komunikasi politik) terbuka terhadap berbagai definisi yang relatif luas. Sebagai contoh, Denton dan Woodward mengajukan definisi komunikasi politik sebagai pembahasan murni tentang alokasi sumber daya atau khazanah publik, yaitu “wewenang resmi (yang mendapatkan kekuasaan untuk membuat

keputusan legal, legislatif dan eksekutif), dan sanksi resmi (penghargaan dan hukuman dari negara).”

Definisi ini hanya mencakup retorika lisan dan tertulis, namun komunikasi tindakan simbolik semakin signifikan untuk memahami proses politik secara keseluruhan. Doris Graber mengajukan definisi yang lebih komprehensif tentang apa yang disebut sebagai “bahasa politik”. Dia mengajukan bahwa komunikasi politik tidak hanya meliputi retorika, namun tanda-tanda paralinguistik sebagai bahasa tubuh dan tindakan politik seperti boikot dan protes.

Denton dan Woodward kemudian mengungkap ciri-ciri komunikasi politik dalam kaitannya dengan maksud (*intention*) pengirimnya untuk mempengaruhi lingkungan politik sebagai berikut. “Faktor terpenting dari komunikasi ‘politik’ tidak hanya sumber dari sebuah pesan (atau kita mengimbuhi, dengan mengacu pada penekanan sebelumnya dari kedua penulis, yaitu ‘diskusi publik’, bentuk pesan), namun isi dan tujuannya.”

Dengan penekanan terhadap maksud (*intentionality*) dari komunikasi politik, maka komunikasi politik mencakup:

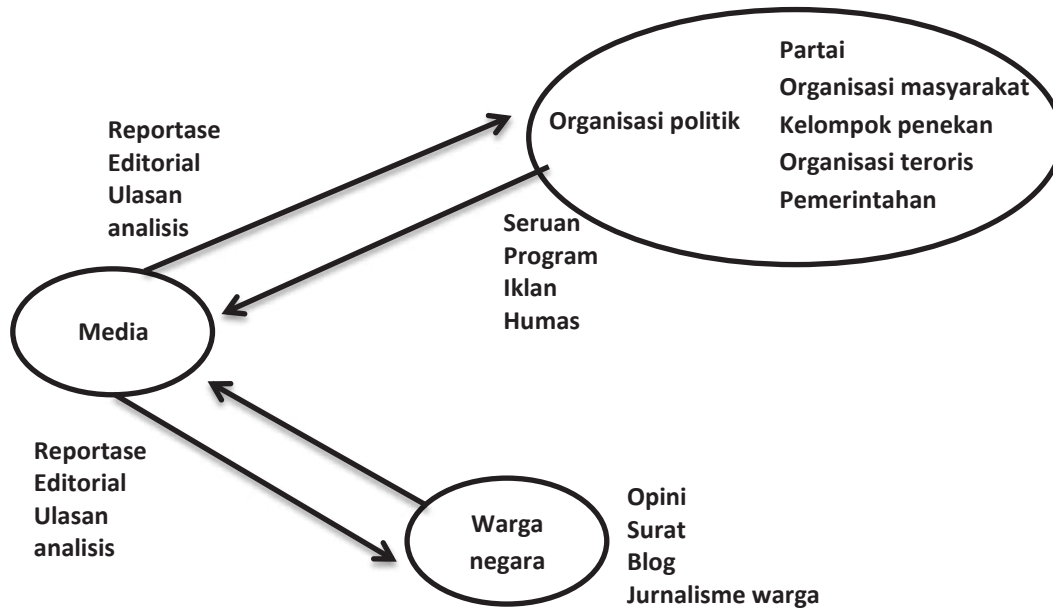
1. Semua bentuk komunikasi yang digunakan para politisi dan aktor politik lainnya untuk mencapai tujuan khusus.
2. Komunikasi yang ditujukan kepada para aktor politik oleh non politisi seperti para pemilih dan penulis di media massa.
3. Komunikasi tentang para aktor politik dan kegiatannya yang dimuat dalam laporan, editorial

dan bentuk media diskusi politik lainnya.

Imbuhan penting Graber tentang bahasa politik melengkapi pernyataan lisan dan tertulis sebagai sarana penandaan (*signification*), yaitu semua unsur komunikasi yang bisa membentuk ‘citra’ atau identitas politik.

Meskipun demikian, menurut McNair, komunikasi politik juga mencakup diskusi penting dari subjek komunikasi politik antar pribadi. Diskusi politik rakyat di kafe atau pesta, negosiasi pintu tertutup oleh pemerintahan dan informasi yang dihimpun para wartawan dari pertemuan langsung dengan sumber-sumber tingkat tinggi, sangat penting dalam proses politik. Semua bentuk komunikasi ini tersembunyi dari para peneliti, serta memerlukan penelitian dengan metodologi yang sulit dan biaya empiris yang besar untuk mengungkap rahasia komunikasi politik mereka. Karena itu, McNair mencatat kesenjangan antara retorika politik publik dan pribadi. Namun, bukankah rahasia-rahasia dari kebijakan politik dan komunikasi aktor politik penting di dunia sudah diungkap dengan meretas jaringan komunikasi digital (misalnya email, atau penyadapan percakapan telepon dari para pejabat tinggi), oleh para aktivis politik jurnalisme terkemuka seperti John Pilger, Jullian Assange, dan Edward Snowden?

McNair mencapai kesimpulan yang sama dengan para penulis sebelumnya, tentang tiga unsur komunikasi politik terangkum dalam Gambar 3.



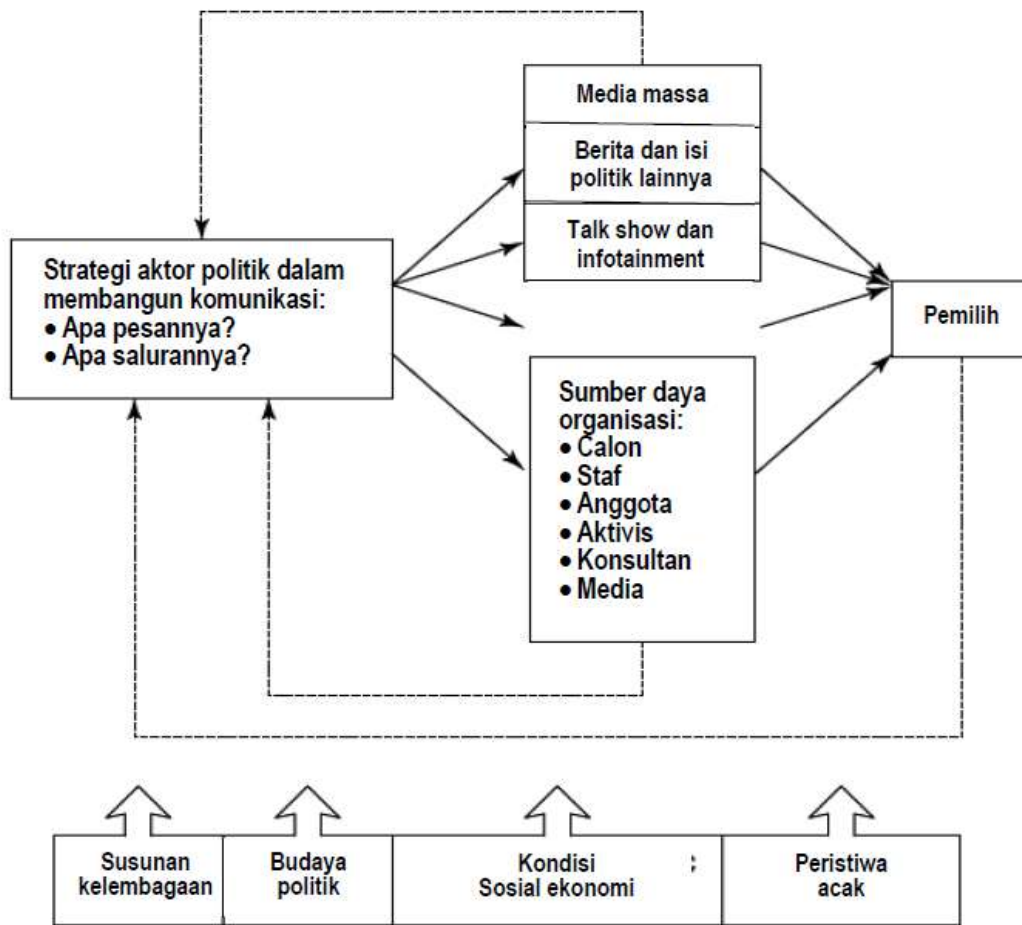
Gambar 3 Unsur komunikasi politik

Definisi komunikasi politik yang diteliti dan dirangkum McNair sesungguhnya hanya mencakup bentuk dan tujuan, bukan esensi komunikasi politik untuk mengatasi semua definisi yang dianggap tidak mungkin mencapai kesepakatan. Masalah ini sesungguhnya bukan terletak pada definisi apapun dengan imbuhan yang dimasukkan, namun berkaitan dengan intisari dari esensi komunikasi politik yang menyangkut semua komunikasi politik.

Lilleker (2006: 2-3) menyatakan bahwa lantaran perkembangan dalam bidang politik, sosial dan teknologi, maka langgam dan substansi komunikasi politik sudah mengalami perubahan. Dalam negara demokrasi, ada sejumlah besar suara politik dari aktor pemilu dan

bukan, saling bersaing di hadapan publik. Dengan demikian, komunikasi politik menjadi bidang yang sangat kompleks, bukan hanya sebagai ranah penelitian akademik, namun juga prakteknya. Karena itu, Lilleker mengungkap penelitian komunikasi politik, mencakup *tipe*, *fungsi* dan *komunikasi* dari mereka yang menyampaikan pesan politik.

Tipe mencakup pertemuan antara aktor politik dan para pemilih atau publik luas, dalam panggung kampanye, long march dan sebagainya dengan menggunakan teknologi. Secara komprehensif, Gambar 4 menunjukkan model kampanye dalam momentum pemilihan umum.



Gambar 4 Model Kampanye (Lilleker, 2006: 50)

Fungsi komunikasi politik tidak hanya memprioritaskan pesan yang benar kepada para pendukung dan pemilihnya, namun kepada rekan koalisi potensial serta para pendukung dan pemilihnya. Sementara komunikasi politik antar negara berfungsi sebagai diplomasi.

Selain komunikasi politik yang berfungsi untuk meraih dukungan, ada fungsi informatif yang biasanya dijalankan oleh pemerintahan. Publik harus mengetahui perundang-undangan baru, bagaimana mereka dipengaruhi dan mematuhi. Tajuk bentuk komunikasi ini biasanya disebut “informasi publik.”

Semua isu kontekstual harus dipertimbangkan ketika komunikasi dibangun. Jadi studi komunikasi politik

harus mempertimbangkan semua fungsi yang direncanakan untuk berbagai pemirsa yang menerima pesan politik.

Kompleksitas yang dihadapi organisasi politik ketika berkomunikasi dengan publik mendorong penggunaan dan penerapan metode komunikasi yang canggih. Namun, dalam kebanyakan negara demokratis, politik sedang mengalami krisis. Publik menjadi apatis dan tidak sudi lagi mendengar pesan komunikasi politik. Politik dipandang terpisah dari masyarakat, sementara politisi dipandang sebagai aktor pencari kepentingan pribadi dan haus kekuasaan. komunikasi politik semakin pelik. Bagaimana menggugah kepercayaan masyarakat? Inilah masalah mendasar

bagi masa depan pemerintahan dan strategi komunikasinya pada abad ke-21.

Krisis politik yang dihadapi pemerintahan dan partai politik atau para calon legislatif tidak dialami oleh organisasi non partai. Meskipun politik mereka memuat isu tunggal dan bias isunya, mereka tampaknya lebih dipercaya dan lebih mampu menyampaikan pesan mereka kepada masyarakat. Namun mereka yang dianggap mampu mempengaruhi masyarakat adalah para tokoh di pinggiran politik, yaitu para selebritis yang terlibat dalam politik. Selama lebih enam dasawarsa yang silam dari perkembangan televisi, sejumlah pribadi, aktor dan musisi mengambil peran politik yang semakin meningkat. Ketika popularitas sosok politisi merosot, kekuatan politik selebritis meningkat dan problem justru semakin memburuk.

KESIMPULAN

Paparan analisis secara historis dan kritis menunjukkan berbagai persepektif dan problem dalam komunikasi politik dan politik pada umumnya. Mayoritas sarjana Barat secara historis selalu merujuk pada Yunani kuno dalam kajian komunikasi politik, meskipun mereka sudah mencapai konsepsi umum tentang komunikasi politik. Dalam kajian mereka, unsur-unsur komunikasi politik yang diungkap para sarjana, mencapai kesepakatan umum, yaitu subjek, isi dan objek. Kemajuan ilmiah ini tidak terletak pada kesepakatan, tetapi nilai objektivitasnya. Namun unsur kontradiksi dan terminologi klasifikasinya menunjukkan jarak dari analisa kepentingan ekonomi politik, sebagai disiplin ilmu yang mendasari struktur politik *an sich*. Karena itu, analisa ekonomi politik yang nyaris disisihkan oleh para sarjana dalam meneliti komunikasi politik,

sesungguhnya merupakan unsur dasar atau esensi dari semua tindakan komunikasi politik.

Dengan demikian, konsepsi komunikasi politik adalah pesan politik interaktif, kompetitif dan kontradiktif dari berbagai kepentingan dan kekuatan ekonomi politik untuk mencapai tujuan politik tertentu dengan menggunakan sarana dan piranti komunikasi. Apakah interaksinya bersifat dari atas ke bawah, timbal balik atau umpan balik dari bawah ke atas dalam struktur politik tertentu, berkaitan dengan bentuk atau tatanan politik dengan penelitian kuantitas dan kualitas pesan dalam ruang dan waktu politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Brian McNair, *An Introduction To Political Communication*, Routledge, New York, 1995
- D.T. Potts (ed.), *A Companion to The Archaeology of the Ancient Near East*, Volume I, Blackwell Publishing Ltd., 2012
- Dan Nimmo. *Komunikasi Politik*. Rosda, Bandung, 1982.
- Darren G. Lilleker, *Key Concepts in Political Communication*, SAGE Publications Ltd, London, California, New Delhi, 2006
- Gabriel Almond and G Bingham Powell, *Comparative Politics: A Developmental Approach*, New Delhi, Oxford & IBH Publishing Company, 1976.
- Gabriel Almond, *The Politics of the Development Areas*, 1960.
- Kaid, L. L., Sanders, K. R., & Hirsch, R. O., *Political campaign communication: A bibliography and guide to the literature*, Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1974.
- Lynda Lee Kaid (ed.), *Handbook of Political Communication*

- Research*, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 2004
- Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (ed.), *Indonesia dan Komunikasi Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Newman., *UK Election 2010, Mainstream Media and the Role of the Internet: How social and digital media affected the business of politics and journalism*, Oxford, Reuters Institute for the Study of Journalism, 2010.
- Nimmo, D. D., & Sanders, K. R. (Eds.), *Handbook of political communication*. Beverly Hills, CA: Sage, 1981.
- Richard M. Perloff, *The Dynamics of Political Communication: Media and Politics in a Digital Age*, Routledge, New York, 2014